

**ANALISIS YURIDIS KONFLIK SEPARATIS BERSENJATA YANG DILAKUKAN  
OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Eko Bayu Saputra \***  
**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H \*\***  
**Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum \*\***

**ABSTRAK**

Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Organisasi Papua Merdeka (OPM) menganggap kelompok ini sebagai pejuang yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Serangkaian serangan oleh KKB/KSB/OPM terhadap aparat keamanan di Papua mendorong pemerintah untuk menetapkan tindakan kekerasan tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana fenomena konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, , bagaimana upaya negara Indonesia dalam penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, bagaimana hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Fenomena konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah OPM yang merupakan gerakan separatis, sering melakukan tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai terorisme, terutama jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU tersebut. Penetapan OPM sebagai organisasi teroris memiliki implikasi hukum yang signifikan, termasuk penerapan sanksi pidana terorisme bagi anggotanya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya negara Indonesia dalam penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dilakukan melalui pendekatan keamanan, pembangunan, dan dialog. Hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka terdiri dari dua faktor yaitu faktor historis dan politik serta faktor sosial dan ekonomi.

**Kata Kunci: Konflik, Separatis Bersenjata, Teroris**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**A LEGAL ANALYSIS OF THE ARMED SEPARATIST CONFLICT  
CARRIED OUT BY THE FREE PAPUA ORGANIZATION FROM  
THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 5 OF 2018  
CONCERNING THE ERADICATION OF  
CRIMINAL ACTS OF TERRORISM**

**Eko Bayu Saputra \***  
**Dr. Mukidi, SE., SH., M.H \*\***  
**Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum \*\***

**ABSTRACT**

*The Armed Separatist Group (KSB). The Free Papua Movement (OPM) considers this group to be fighters seeking secession from Indonesia. A series of attacks by the KKB/KSB/OPM against security forces in Papua prompted the government to designate these acts of violence as acts of terrorism. The problem in this thesis is how the armed separatist conflict perpetrated by the Free Papua Organization (OPM) is viewed from the perspective of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, how the Indonesian state is addressing the armed separatist conflict perpetrated by the OPM, and what obstacles it faces in addressing the armed separatist conflict perpetrated by the OPM.*

*This research is normative research using library research. The data analysis used is qualitative.*

*The armed separatist conflict perpetrated by the OPM from the perspective of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism is characterized by the OPM, a separatist movement, frequently committing acts of violence categorized as terrorism, particularly if these acts meet the elements stipulated in the law. The designation of the OPM as a terrorist organization has significant legal implications, including the imposition of criminal sanctions for terrorism on its members.*

*Based on the research results, it is known that Indonesia's efforts to address the armed separatist conflict carried out by the Free Papua Movement (OPM) are carried out through security, development, and dialogue approaches. Obstacles to addressing the armed separatist conflict carried out by the OPM include a dominant security approach, and a lack of trust between the government and the Papuan people, which is a major obstacle to conflict resolution.*

**Keywords: Conflict, Armed Separatists, Terrorists**

*\*Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

*\*\*Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra*